



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUNI WULANSARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 742047

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 289 m2/270 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 247.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2011, HADIAH Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2017, HADIAH Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G DSL Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU MPNP/MINIBUS Tahun 2013, WARISAN Rp. 75.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 39.575.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 867.075.000

**III. HUTANG** Rp. 3.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 864.075.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.